

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2022 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Palembang, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan



Mirwansyah, SKM, MKM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650501 198503 1006

BAB I

PENDAHULUAN

DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, pada Pasal 4 menyatakan Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan membantu Gubernur melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 adalah :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan pedesaan, penanganan kemiskinan perkotaan, penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;
- e. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosial;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial, maka penataan susunan organisasi dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Provinsi Sumatera Selatan pada pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi
 - 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Sosia;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi;
 - 1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang;
 - 3. Seksi Rehabilitasi,Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial; membawahi;
 - 1. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
- f. Bidang Penanganan Kemiskinan membawahi;
 - 1. Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan;

2. Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan;
 3. Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

SISTEMATIKA LKjIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan,

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Bab II - Rencana Strategis dan Rencana Kinerja,

Menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2019-2023 dan rencana kerja tahunan 2022.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja,

Menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022, serta realisasi anggaran.

Bab IV -Penutup,

Menjelaskan berisi kesimpulan tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai suatu instansi sektor publik, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mempunyai rencana yang strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2019 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasarannya akan diuraikan dalam bab ini.

Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2022.

A. PENDAHULUAN

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Perencanaan strategik membutuhkan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*oppurtunities*), dan tantangan / kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur–unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta strategi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan perkataan lain, rencana strategik yang disusun Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mengandung Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya serta menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya.

Dengan visi, misi, dan strategis yang jelas dan tepat, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas

kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Perencanaan strategik ini setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan : (1) dimana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan berada sekarang, (2) kemana arah tujuan, dan (3) bagaimana untuk menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan visi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, misi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi di dalam memenuhi visinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju ke sana dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Dari uraian singkat di atas, unsur – unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategik serta strategi pencapaian tujuan / sasaran berupa program dan kegiatan.

B. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatnya citra aparat, masyarakat dan Provinsi Sumatera Selatan. Bagi manajemen Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, RENSTRA dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan;

- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Merupakan alat untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2019 – 2023 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2019 – 2023 tersebut.

PERNYATAAN VISI DAN MISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu :

“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”

1. Misi

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dari 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang ada maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi ke-1 (satu) yaitu:

“ Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun perdesaan”, yang mendukung sasaran “Maju Kesejahteraan Rakyat”.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

2. Tujuan

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah :

“ Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan. Sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing – masing tujuan yang telah ditetapkan.

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis Gubernur Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan. Gubernur Sumatera Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan urusan sosial yaitu sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Angka Kemiskinan	Prosentase penduduk sumsel yang hidup di bawah garis kemiskinan	Dinas Sosial	BPS
2	Gini Rasio	Angka Gini Rasio di Prov. Sumatera Selatan	Dinas Sosial	BPS

2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Secara umum tujuan dari Dinas social Provinsi Sumatera Selatan adalah Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diwujudkan dengan indicator sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	7
1.	Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinas Sosial
2.	Meningkatnya Panti Sosial yang menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial
3.	Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial
4.	Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Dinas Sosial
5.	Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Dinas Sosial
6.	Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Dinas Sosial
7.	Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Dinas Sosial
8.	Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Dinas Sosial

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) untuk Tahun Anggaran 2022. Rencana

Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang dapat dicapai dalam Tahun 2022. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja 2022 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik – baiknya dan sebagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun ini.

Pada tahun 2022 Target Kinerja yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Angka Kemiskinan	11,94- 12,77
2	Gini Rasio	0.352

INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGER KINERJA (%)
1	3	7
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	54,67
2.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	100,00
3.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	8,5
4.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
5.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
6.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
7.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGER KINERJA (%)
1	3	7
8.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100

D. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Total Pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 45.809.967.050.- (*Empat puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*) yang terdiri atas :

Belanja Operasi : Rp. 43.989.967.050.-

- *Belanja Pegawai* : Rp. 16.782.337.000,- (38,15 %)
- *Belanja Barang dan Jasa* : Rp. 24.207.630.050,- (55,02%)
- *Belanja Hibah* : Rp. 3.000.000.000,- (6,81%)

Belanja Modal : Rp. 1.820.000.000.-

- *Belanja Modal Peralatan dan Mesin* : Rp. 1.820.000.000,- (4,48 %)

Belanja tersebut terdiri atas 6 Program dan 16 Kegiatan dan 60 sub kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b) Program Pemberdayaan Sosial
- c) Program Rehabilitasi Sosial
- d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e) Program Penanganan Bencana
- f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sedangkan total pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN/ Dekonsentrasi tidak lagi dialokasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Dinas Sosial tahun 2019-2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

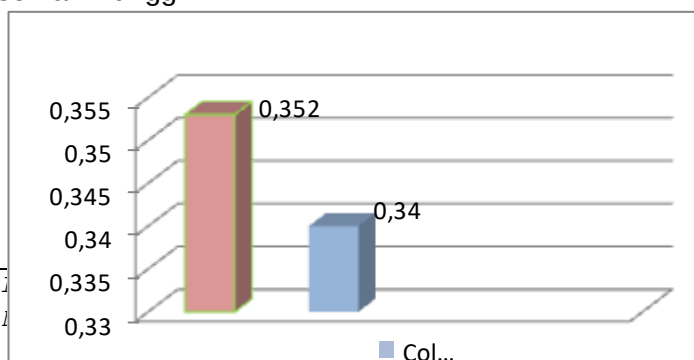
Secara umum target indikator yang ditetapkan bisa dicapai pada tahun ini dan sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan	12,28 - 12,87	11,90	100 %
2	Gini Rasio	0.353	0,34	100 %

1.1 Ratio Gini

Rasio Gini adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan dimana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Rasio Gini = 0 mengindikasikan ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sementara Rasio Gini = 1 menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Semakin mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi.



Pada September 2021 rasio gini di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,340% (sumber BPS 2021),

Grafik 1.3 Ratio Gini Tahun 2021

sedangkan target Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sebesar 0,352%, mengalami penurunan sebesar 0,014 point. Penurunan ini merupakan hasil dari intervensi pemerintah diberbagai sektor yang menyentuh langsung kemasyarakat. Kondisi ini cukup menggembirakan ditengah hadirnya pandemi Covid-19 telah berlangsung selama periode 2 tahun yang membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Penurunan rasio gini di Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada grafik diatas.

Tercapainya target penurunan Rasio Gini di Provinsi Sumatera Selatan menandakan terjadinya perbaikan pemerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun penyebab dari menurunnya Rasio Gini antara lain :

1. Perluasan jangkauan dan penambahan jumlah penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin/rentan;

Pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial sebanyak 2.444.966 jiwa yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (dipedesaan maupun perkotaan), mengalami kenaikan sebesar 77,99% atau 537.942 jiwa jika dibandingkan capaian pada tahun 2019 sebanyak 1.907.024 jiwa. Dengan adanya perluasan jangkauan dan penambahan jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin/rentan tersebut. dan menguatkan perekonomian mereka.

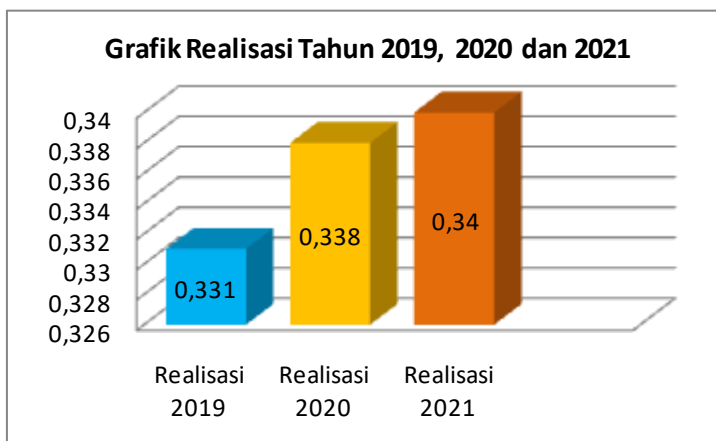
2. Penambahan indeks bantuan sosial bagi penerima PKH dan Program Sembako Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) khusus bagi Ibu Hamil dan Anak Balita mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 2.400.000/tahun, pada tahun 2020 mengalami penambahan indeks sebagai berikut:

a.	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000.-
b.	Anak Balita	Rp. 3.000.000.-
c.	SD	Rp. 900.000.-
d.	SMP	Rp. 1.500.000.-
e.	SMA	Rp. 2.000.000.-
f.	Penyandang Disabilitas	Rp. 2.400.000.-
g.	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000.-

3. Penambahan indeks bantuan untuk program sembako yang semula sebesar Rp.110.000/KPM/bulan, maka pada Program Sembako indeks meningkat menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Bantuan sosial program sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan bahan pangan pokok yang menjadi hak

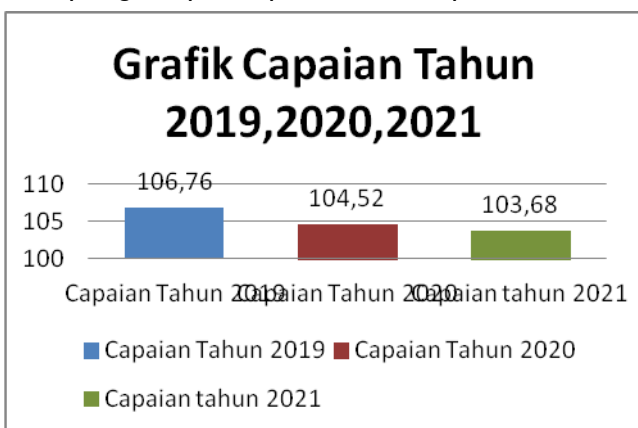
dasarnya. Bantuan sosial pangan ini diberikan dalam bentuk non tunai (cashless) melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga KPM dapat menggunakan untuk memperoleh bahan makanan pangan di e-Warong yang tersedia/ yang ditunjuk.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini nasional pada bulan Maret 2022 sebesar 0,384. Jika dibandingkan dengan rasio gini Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,340, maka angka ini masih berada dibawah rata-rata nasional. Penurunan rasio gini di Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil dari berbagai intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan penerima manfaat PKH dan kartu sembako, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga sudah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi. (Perbandingan target nasional).



Grafik 1.4 Perbandingan Realisasi Ratio Gini Tahun 2019 s.d 2021

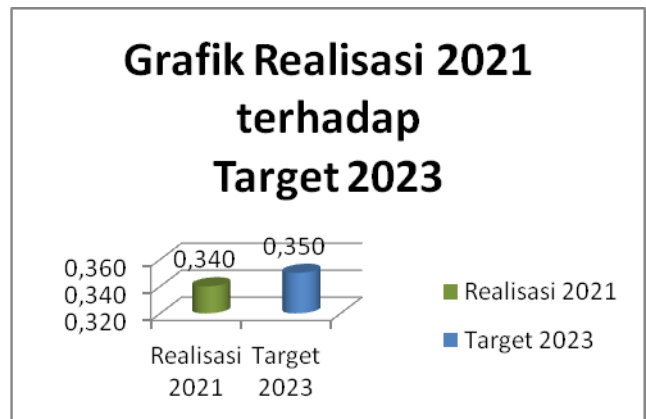
kembali pada tahun 2019 menjadi 0,331, artinya Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian yang semakin membaik karena semakin rendah ketimpangan pendapatan antar penduduk di Sumatera Selatan. Perbandingan



Jika dilihat dari grafik disamping Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014-2019 cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai 2019 Gini Rasio turun dari 0,365 pada tahun 2017 menjadi 0,341 pada tahun 2018 serta menurun kembali pada tahun 2019 menjadi 0,331, artinya Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian yang semakin membaik karena semakin rendah ketimpangan pendapatan antar penduduk di Sumatera Selatan. Perbandingan realisasi rasio gini tahun 2020 sebesar 0,338 mengalami kenaikan 0,007 dari tahun 2019 yang sebesar 0,331. Penurunan ini merupakan hasil dari intervensi pemerintah diberbagai sektor yang menyentuh langsung masyarakat. Kondisi ini cukup menggembirakan ditengah

hadirnya pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat 0,002 hal ini menandakan naiknya angka ketimpangan pendapatan yang terjadi dimasyarakat walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Pandemi ini telah berujung pada krisis sosial ekonomi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penanganan dampak Covid-19 telah dilakukan dengan berbagai program kegiatan Jaring Pengaman Sosial seperti pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 1.700 KK warga masyarakat yang terkena dampak pandemi di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, bantuan paket sembako dan bantuan nasi kotak. Jaring Pengaman Sosial yang dilaksanakan bertujuan untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat miskin dan rentan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari serta mampu bertahan hidup ditengah pandemi yang masih terus berlangsung.

Dari grafik disamping dapat dilihat capaian ratio gini dari tahun 2019 s.d 2021 mengalami penurunan. Penurunan ini merupakan intervensi pemerintah diberbagai sektor yang menyentuh langsung kemasyarakat walaupun ditengah hadirnya Covid-19 yang berdampak pada kemiskinan diberbagai sektor. Penurunan yang



signifikan terjadi tahun 2021 dengan capaian 103,68 hal ini disebabkan adanya naiknya angka ketimpangan pendapatan yang tidak terlalu signifikan. Dari grafik disamping realisasi tahun 2021 ratio gini sebesar 0,340 belum mencapai target tahun 2023 sebesar 0,350. Harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas Sosial dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

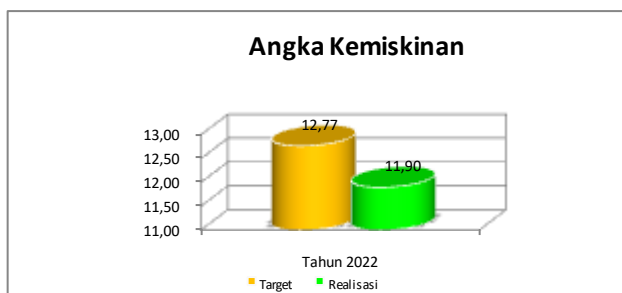
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ratio Gini yaitu :

Keberhasilan Pengurangan Ratio Gini merupakan kerja Bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat di laksanakan sendiri oleh Dinas Sosial saja. Terlebih banyak sekali aspek yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kemiskinan di suatu daerah. Oleh sebab itu banyak hal yang harus diperbaiki agar kedepanya tujuan dari pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi 1 (satu) digit bisa tercapai dengan maksimal. Hal – hal yang perlu diperhatikan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kurang akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat DTKS ini merupakan data rujukan yang digunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan data tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
2. Kurangnya Kolaborasi dan Koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait. Mengingat Rasio Gini merupakan kerja Bersama dengan seluruh *stakeholder* terkait maka perlu dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang lenih intens lagi agar semua komponen dapat fokus untuk mengerjakan tujuan yang sama dan hasil yang dihasilkanpun lebih maksimal.
3. Pandemi Covid-19 yang masih terus melanda. Covid-19 memberikan pukulan yang cukup berat bagi kondisi perekonomian masyarakat karena menyebabkan gangguan di segala sendi kehidupan khususnya dalam hal berusaha, tentunya

hal tersebut semakin memperberat tugas pemerintah dalam mencapai tujuan pengurangan Rasio Gini.

4.1 Angka Kemiskinan



Grafik 1.26 Angka Kemiskinan Tahun 2022

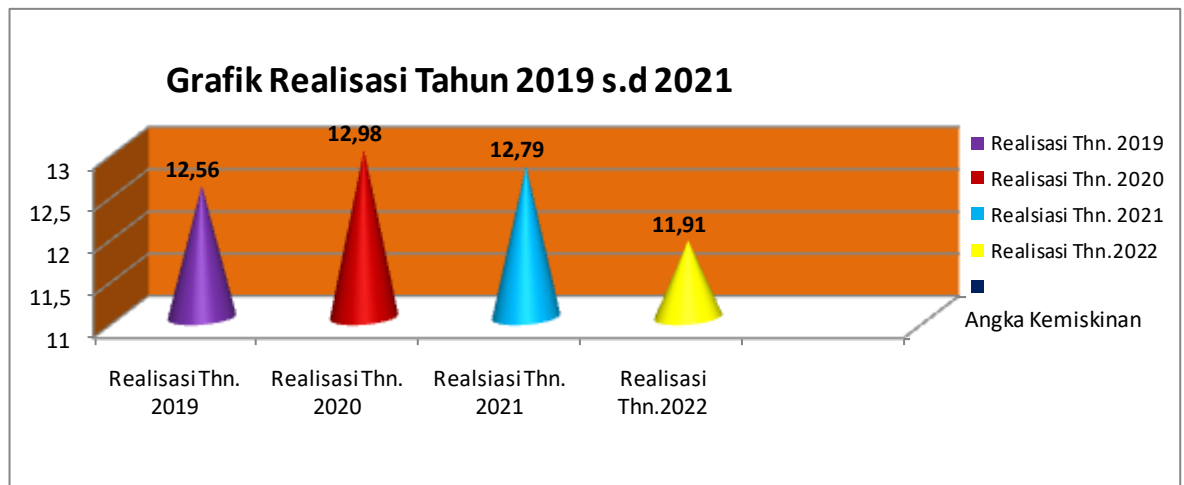
Pada kurun satu tahun terakhir Maret 2021-Maret 2022 angka kemiskinan Sumatera Selatan turun sebesar 0,94 persen poin dari 12,84 persen menjadi 11,90 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya turun

sebanyak 69,07 ribu orang dari 1.113,76 ribu orang menjadi 1.044,69 ribu orang. Dibandingkan September 2021, angka kemiskinan Maret 2022 Sumatera Selatan juga turun sebesar 0,89 persen poin dari 12,79 persen menjadi 11,90 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya turun sebanyak 71,92 ribu orang dari 1.116,61 ribu orang menjadi 1.044,69 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai angka 1.116,61 ribu orang atau 12,78% dari total penduduk, melebihi angka kemiskinan nasional sebesar 10,19%. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 12,36 persen turun menjadi 11,99 persen pada September 2021 dan turun menjadi 11,23 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,12 persen pada Maret 2021 menjadi 13,28 persen pada September 2021 dan turun menjadi 12,31 persen pada Maret 2022.

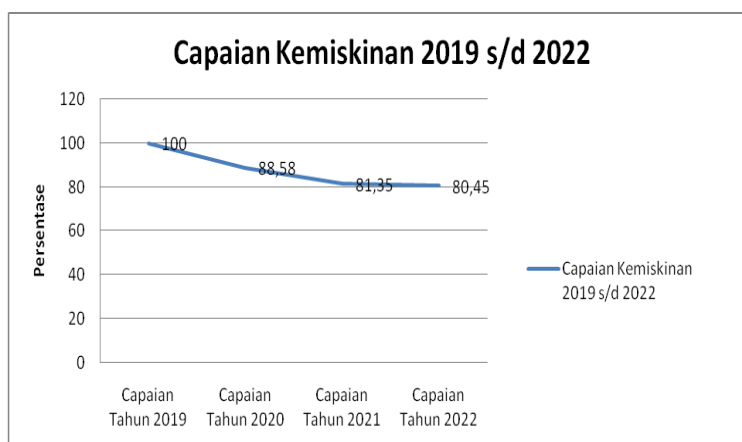
Peranan kelompok makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) Maret 2022 tercatat sebesar 74,34 naik jika dibandingkan kondisi September 2021 sebesar 74,16 persen, dan turun jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang sebesar 74,45 persen. Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, cabe merah, roti, bawang merah, dan kopi bubuk & kopi instan (sachet). Sedangkan komoditas bukan makanan adalah perumahan, bensin,

listrik, pendidikan, perawatan kulit, muka, kuku, rambut, dan perlengkapan mandi. Pada periode Maret 2021 - Maret 2022, maupun periode September 2021-Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan.



Grafik 1.27 Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s.d 2022

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebagaimana yang tergambar pada grafik diatas, maka dapat dilihat terjadi penurunan capaian indikator kinerja. Angka kemiskinan ditahun 2019 sebesar 12,56% dan ditahun 2020 sebesar 12,98% mengalami penurunan capaian sebesar 0,42%. Sama halnya pada tahun 2021 capaian indikator menurun dari tahun 2020 sebesar 019% sedangkan pada tahun 2022 angka kemiskinan sebesar 11,90% realisasi capaian indikator kinerja mengalami penurunan sebesar 0,89% dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 penurunan capaian indikator menjadi yang paling signifikan selama periode tiga tahun kebelakang mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021.



Jika dilihat dari grafik disamping capaian angka kemiskinan dari tahun 2019 s.d 2022 mengalami penurunan. Pandemi Covid-19 merupakan penyebab terjadinya penurunan capaian indikator kinerja ini.

turunnya angka kemiskinan Sumsel yang sebelumnya di angka 12,84 persen menjadi 11,90 persen pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,98persen.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 sempat terjadi kontraksi hingga -0,11 persen akibat pandemi covid-19, di tahun 2022 ini kembali meningkat menjadi 5,18 persen. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui program kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 ini. Semua usaha yang dilakukan untuk meringankan beban hidup masyarakat melalui Program Jaring Pengaman Sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagai bentuk perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup, meningkatkan jangkauan pelayanan dan perluasan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Keberhasilan pengurangan angka kemiskinan merupakan kerja sama bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Sosial tapi dari seluruh aspek stakeholder yang ada. Oleh sebab itu banyak hal yang harus diperbaiki agar kedepan tujuan pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan bisa tercapai secara maksimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Kurang akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat DTKS ini merupakan data rujukan yang digunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan data tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
2. Kurangnya Kolaborasi dan Koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait. Mengingat kemiskinan merupakan kerja Bersama dengan seluruh *stakeholder* terkait maka perlu dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens lagi agar semua komponen dapat fokus untuk mengerjakan tujuan yang sama dan hasil yang dihasilkanpun lebih maksimal.
3. Pandemi Covid-19 yang masih terus melanda selama 2 tahun ini. Covid-19 memberikan pukulan yang cukup berat bagi kondisi perekonomian masyarakat karena menyebabkan gangguan di segala sendi kehidupan khususnya dalam hal berusaha, tentunya hal tersebut semakin memperberat tugas pemerintah dalam mencapai tujuan pengurangan angka kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup. Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut berperan dalam penurunan angka kemiskinan disamping instansi terkait

lainnya. Adapun program kegiatan yang mendukung terjadinya penurunan angka kemiskinan ini antara lain:

1. Program Nasional dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 309.285 Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM).

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Tujuan dari program ini untuk :

- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sangat miskin;
- Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan);
- Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib pendidikan dasar 12 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Kriteria dari PKH ini adalah Rumah Tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah Ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia berusia 70 tahun keatas. Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada 17 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Muba, OKI, OI, Lahat, Musi Rawas, Empat Lawang, Muara Enim, OKU, OKUS, OKUT, PALI dan Muratara.

2. Bantuan Program Sembako kepada warga miskin di Provinsi Sumatera Selatan di 17 Kabupaten/Kota. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebesar Rp. 200.000/bulan sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat akan kebutuhan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya berupa beras dan telur.
3. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Miskin di wilayah 9 Kabupaten/Kota sebanyak 900 KK. Bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan/bahan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki embrio usaha namun terhambat perkembangannya sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, Melalui pelayanan sosial didalam panti, diluar panti dan bantuan sosial (Asistensi Lanjut Usia/Bantuan Langsung Tunai) bagi lansia non potensial serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia potensial.
5. Program Perlindungan Sosial Anak Pelayanan didalam panti, diluar panti dan bantuan sosial bagi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
6. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), pemberian bantuan cash transfer bagi penyandang disabilitas berat dan bantuan alat bantu, penjangkauan kedaruratan/bebas pasung bagi penyandang disabilitas mental (orang dengan gangguan jiwa)
7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial
Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.



Grafik 1.28 Perbandingan Target 2023 dan Realisasi Tahun 2022

Jika dilihat Capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Angka Kemiskinan ditahun 2022 sebesar 11,90%, belum mencapai target yang diharapkan. Pada akhir tahun 2023 ditargetkan Angka Kemiskinan di

Provinsi Sumatera Selatan sebesar 9,50%. Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 (satu) digit, karena itu diperlukan adanya :

- Optimalisasi sinergitas program kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan kemiskinan.
- Peningkatan kualitas data melalui perbaikan secara bertahap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) khususnya bagi keluarga miskin dan rentan dengan melakukan verifikasi dan validasi data.
- Peningkatan partisipasi dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berikut program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan :

- I. Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pemberdayaan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

- II. Program Rehabilitasi Sosial dengan beberapa Kegiatan yang dilakukan yaitu :
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar didalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia terlantar didalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis didalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti.

- III. Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dengan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi.

- IV. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi

2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Adapun realisasi dari indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)	REALISASI %
1	3	7	
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	54,67	88,80
2.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100,00	100
3.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	8,5	
4.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
5.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
6.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGER KINERJA (%)	REALISASI %
1	3	7	
7.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
8.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100

Dalam tahun 2022 capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sangat baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja diatas semuanya mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran dan indikator yang tersebut dapat dilihat melalui penjelasan sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, target 52,73% dan realisasi 85,26 %.**

Terlampauinya target ini dikarenakan adanya ;

- Program Nasional dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 281.171 Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM).

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin.

Tujuan dari program ini untuk :

- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sangat miskin;
- Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan);

- Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib pendidikan dasar 12 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Kriteria dari PKH ini adalah Rumah Tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah Ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia berusia 70 tahun keatas. Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada 17 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Peran pendamping PKH sangat penting dalam mendorong dan memotivasi KPM untuk lebih mandiri. Peran dan keterampilan pendamping dalam memfasilitasi sangat menentukan progresivitas KPM PKH dampingannya . Para pendamping Program PKH dibekali berbagai keterampilan pendampingan yang akan meningkatkan kapasitas mereka dalam mendampingi KPM. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana PKH dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan teknis (Bimtek), dan bimbingan pemantapan kebutuhan program. Kepekaan, keterampilan, dan semangat seorang pendamping sangat menentukan kegigihan usahanya mengantarkan graduasi KPM PKH dampingannya. Kedepannya lebih ditekankan untuk optimalisasi peran pendamping dalam rangka percepatan rasio graduasi KPM yang lebih tinggi.

- Program Sembako yang diberikan kepada 433.959 KPM, sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat akan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Program Sembako merupakan upaya pemerintah untuk menstransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (cashless) melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga KPM dapat

menggunakan untuk memperoleh bahan makanan pangan di e-Warong yang tersedia.

Tujuan dari program Sembako adalah sebagai berikut;

- Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
- Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sedangkan manfaat dari program Sembako adalah :

- ✓ Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- ✓ Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- ✓ Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan
- ✓ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Dengan adanya program Sembako, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dalam hal makanan, sehingga dapat membuat sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi.

Selain itu, penambahan jenis bahan pangan yang diberikan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, terutama untuk menekan angka stunting di Indonesia.

Penyaluran dana program Sembako dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) dan tidak dapat diambil tunai. Bila komoditas yang dapat dibelanjakan sebelumnya beras dan atau telur, pada Program Sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung

karbohidrat (jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).

➤ **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial**

Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.

➤ **Bantuan beras bagi warga yang terdampak PPKM di Provinsi Sumatera Selatan**

Bantuan ini merupakan Program Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak kebijakan PPKM di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah warga yang menerima bantuan sebanyak 100.000 KK, setiap KK mendapatkan bantuan sebesar 5 Kg beras.

2. Meningkatnya pelayanan sosial dalam panti, dengan indikator Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan target 100%, realisasi 100%.

Terlampauinya target ini dikarenakan adanya dukungan Program sebagai berikut:

➤ **Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap 50 orang anak nakal dan anak yang berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Inderalaya"** melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan. Dari 50 anak yang dibina tersebut sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri.

Adapun hasil dari bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut :

- montir motor sebanyak 29 orang, dari jumlah tersebut 15 orang telah bekerja dibengkel motor, 8 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 6 orang masih mencari peluang kerja.

- Las Listrik sebanyak 21 orang, dari jumlah tersebut 12 orang telah bekerja dibengkel las, 6 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 3 orang masih mencari peluang kerja.
- Tahun 2022 UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial (PSRWTS) telah melaksanakan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan meliputi keterampilan salon dan menjahit. Bimbingan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan, masing-masing angkatan sebanyak 25 orang. Pada angkatan 1 (pertama) siswi hanya menerima materi selama 2 bulan dikarenakan pada saat itu masa puncaknya pandemi covid-19 sehingga mereka akhirnya dipulangkan kerumah masing-masing.
- Pada angkatan ke-2 (dua) siswi full menerima materi keterampilan selama 5 bulan, dimana sebelumnya diadakan rapid test terlebih dahulu. Klien yang dibina sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Dari 25 orang siswi tersebut
- 20 orang telah membuka usaha menjahit sendiri dirumah dengan peralatan yang berasal dari bantuan stimulan mesin jahit dari dari UPTD PSRWTS.
 - 5 orang lainnya telah membuka usaha salon didaerahnya masing-masing dengan peralatan yang berasal dari dari bantuan stimulan UPTD PSRWTS.

3. Meningkatnya dukungan PSKS terhadap penanganan PMKS dengan target 9,56% dan realisasi sebesar 10,44%.

Tercapainya sasaran dan indikator ini didukung oleh berapa unsur PSKS yang aktif dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial maupun PSKS yang mendapatkan peningkatan Kapasitas dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

- a. TSKS sebanyak 236 orang
- b. Penyuluh Sosial sebanyak 30 Orang
- c. LKS sebanyak 100 Orang dan
- d. PSM sebanyak 200 orang

4. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.

➤ Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik memberikan pelayanan kepada 12 orang anak penyandang disabilitas di dalam panti berupa :

- pendidikan formal (SDLB-A, SMPLB-A, SMALB-A)
- bimbingan fisik (olahraga, pemeliharaan kesehatan)
- bimbingan mental (keagamaan/ rohani, budi pekerti dan pramuka)
- bimbingan sosial (resosialisasi)
- bimbingan Keterampilan (bermain musik, menyanyi, pijat urut, membuat sapu, membuat kemoceng)
- pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan rujukan ke rumah sakit pemerintah.

Tujuan dari layanan yang diberikan antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
2. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan memberikan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Penyandang Disabilitas di Panti Sosial ini diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya, dapat mengembangkan potensi secara optimal, menjadi pribadi mandiri, percaya diri dan produktif.

5. Meningkatnya Kemandirian Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Anak Terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.

➤ Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap 50 orang anak nakal dan anak yang berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Inderalaya" melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan. Dari 50 anak yang dibina tersebut sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Adapun hasil dari bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut :

- montir motor sebanyak 29 orang, dari jumlah tersebut 15 orang telah bekerja dibengkel motor, 8 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 6 orang masih mencari peluang kerja.
- Las Listrik sebanyak 21 orang, dari jumlah tersebut 12 orang telah bekerja dibengkel las, 6 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 3 orang masih mencari peluang kerja.

6. Meningkatnya Kemandirian Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.

Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dalam UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita melalui pelayanan , bimbingan mental sosial kepada 200 orang Lanjut Usia (Jompo) terlantar yang terbagi pada Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Inderalaya (80 orang), Panti sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang (60 orang), Lanjut Usia Harapan Kita Lubuk linggau (35 orang), Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Musi Rawas (25 orang).

Bimbingan sosial (kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk 2 kegiatan, yang pertama dilaksanakan dalam ruangan pembinaan melalui jadwal yang ada, sedangkan yang kedua dilaksanakan di wisma-wisma yang ada. Pembinaan ini merupakan media yang sangat efektif bagi petugas panti untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik secara idividu maupun kelompok.

Penyaluran bakat keterampilan (kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hak yang bermanfaat seperti membuar kerajinan sapu bulu ayam, keset kaki dan merangkai bunga.

7. Meningkatnya Kemandirian Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.

- Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada 180 orang gelandangan pengemis dan orang terlantar dengan psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berupa bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut. Tujuan dari layanan di panti sosial PR-PGOT ini antara lain:
 - Terpenuhinya kebutuhan dasar klien panti.
Membantu klien panti mencapai kualitas hidup yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
 - Gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak berkeliaran di jalanan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

8. Meningkatnya Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi dengan indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, target 100% dan realisasi 100%.

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial
Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.
- Bantuan beras bagi warga yang terdampak PPKM di Provinsi Sumatera Selatan
Bantuan ini merupakan Program Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak kebijakan PPKM di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah warga yang menerima bantuan sebanyak 100.000 KK, setiap KK mendapatkan bantuan sebesar 5 Kg beras.

B. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 dan 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan social	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	83,30 %	88,80 %
2	Meningkatnya Panti Sosial yang menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%
3	Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	10,44 %	11,60 %
4	Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
5	Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
6	Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
7	Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%

8	Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%
---	---	--	------	------

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat bahwa dalam dua tahun terakhir capaian indicator Dinas Sosial telah berhasil mencapai taret yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar 83,30%, walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar 88,80% tetapi hal tersebut sudah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 54 %. Peningkatan capaian kinerja ini disebabkan meningkatnya jangkauan pelayanan dan perluasan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program kegiatan yang dilaksanakan. Adanya peningkatan capaian ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup.
- Sedangkan untuk indicator yang termasuk kedalam SPM Bidang Sosial capaian pada tahun 2021 sebesar 100% dan ditahun 2022 capaiannya juga 100%.
- Sedangkan 1 (satu) indikator yang belum tercapai adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang kesejahteraan sosial. Pada tahun 2021 capaian indikator tersebut sebesar 10,44% dan capaian tahun 2022 sebesar 11,60%.

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah dana untuk menunjang kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dari Dana APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 38.859.853.489,-** (*Tiga puluh delapan milyar delapan ratus*

lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

1. DANA APBD Tahun 2022

Jumlah dana APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 45.809.967.050,- dengan realisasi per-desember 2022 sebesar Rp. 38.859.853.489,- (84,83%) yang terdiri dari :

- ✓ Belanja Operasi sebesar Rp. 43.989.967.050,- (*Empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 36.934.537.321 atau sebesar 83,96 %.
- ✓ Belanja Modal Rp. 1.820.000.000,- (*Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.812.762.000 atau sebesar (99,60%)

Adapun uraian kegiatan selama tahun 2022 di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI /Des.2022(Rp)	%	SISA ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		22.774.232.050	20.599.615.898	90,45%	
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.000.000	180.471.322	97,03%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.489.721.050	16.485.411.059	89,15%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.000.000	45.800.000	97,45%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.305.831.850	1.214.338.721	92,99%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.580.000.000	1.574.177.000	99,63%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	650.613.000	631.587.583	97,08%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	515.066.150	467.830.213	90,83%	
Program Pemberdayaan Sosial		3.657.370.000	1.882.946.293	51,48%	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.657.370.000	1.882.946.293	51,48%	

Program Rehabilitasi Sosial		8.887.965.000	7.619.679.646	85,73%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	393.510.000	390.953.700	99,35%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.211.525.000	1.205.093.350	99,47%	
	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.178.481.000	2.167.690.206	99,50%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.983.650.000	1.979.816.300	99,81%	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	3.120.799.000	1.876.126.090	60,12%	
Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial		9.117.000.000	7.743.059.552	84,93%	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	9.117.000.000	7.743.059.552	84,93%	
Program Penanganan Bencana		1.264.600.000	907.154.100	71,73%	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.264.600.000	907.154.100	71,73%	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		108.800.000	107.398.000	98,71%	
	Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	108.800.000	107.398.000	98,71%	

Hasil dan manfaatnya yang di peroleh, antara lain :

- Tersalurkannya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi warga miskin di 9 Kabupaten/Kota sebanyak 900 KK. Adapun jenis usaha yang diberikan bantuan antara lain : bengkel motor, steam motor, counter pulsa, warung sembako, usaha kerupuk/kemplang, jual pempek/tekwan, jual gorengan, usaha sarapan pagi, usaha tenun songket, menjahit dan lain-lain

- Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dalam UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita melalui pelayanan , bimbingan mental sosial kepada 200 orang Lanjut Usia (Jompo) terlantar yang terbagi pada Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Inderalaya (80 orang), Panti sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang (60 orang), Lanjut Usia Harapan Kita Lubuk linggau (35 orang), Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Musi Rawas (25 orang).

Bimbingan sosial (kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk 2 kegiatan, yang pertama dilaksanakan dalam ruangan pembinaan melalui jadwal yang ada, sedangkan yang kedua dilaksanakan di wisma-wisma yang ada. Pembinaan ini merupakan media yang sangat efektif bagi petugas panti untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik secara idividu maupun kelompok.

Penyaluran bakat keterampilan (kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hak yang bermanfaat seperti membuar kerajinan sapu bulu ayam, keset kaki dan merangkai bunga.

- Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada 180 orang gelandangan pengemis dan orang terlantar dengan psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berupa bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut. Tujuan dari layanan di panti sosial PR-PGOT ini antara lain:

- Terpenuhinya kebutuhan dasar klien panti.
Membantu klien panti mencapai kualitas hidup yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
- Gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak berkeliaran di jalanan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

- Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik memberikan pelayanan kepada 12 orang anak penyandang disabilitas di dalam panti berupa :

- pendidikan formal (SDLB-A, SMPLB-A, SMALB-A)
- bimbingan fisik (olahraga, pemeliharaan kesehatan)
- bimbingan mental (keagamaan/ rohani, budi pekerti dan pramuka)
- bimbingan sosial (resosialisasi)

- bimbingan Keterampilan (bermain musik, menyanyi, pijat urut, membuat sapu, membuat kemoceng)
- pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan rujukan ke rumah sakit pemerintah.

Tujuan dari layanan yang diberikan antara lain :

3. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
4. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan memberikan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Penyandang Disabilitas di Panti Sosial ini diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya, dapat mengembangkan potensi secara optimal, menjadi pribadi mandiri, percaya diri dan produktif.

- Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap 50 orang anak nakal dan anak yang berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Inderalaya" melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan. Dari 50 anak yang dibina tersebut sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri.

Adapun hasil dari bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut :

- montir motor sebanyak 29 orang, dari jumlah tersebut 15 orang telah bekerja dibengkel motor, 8 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 6 orang masih mencari peluang kerja.
- Las Listrik sebanyak 21 orang, dari jumlah tersebut 12 orang telah bekerja dibengkel las, 6 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 3 orang masih mencari peluang kerja.

- Tahun 2022 UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial (PSRWTS) telah melaksanakan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi

sosial terhadap wanita tuna sosial melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan meliputi keterampilan salon dan menjahit. Bimbingan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan, masing-masing angkatan sebanyak 25 orang. Pada angkatan 1 (pertama) siswi hanya menerima materi selama 2 bulan dikarenakan pada saat itu masa puncaknya pandemi covid-19 sehingga mereka akhirnya dipulangkan kerumah masing-masing.

Pada angkatan ke-2 (dua) siswi full menerima materi keterampilan selama 5 bulan, dimana sebelumnya diadakan rapid test terlebih dahulu. Klien yang dibina sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Dari 25 orang siswi tersebut

- 20 orang telah membuka usaha menjahit sendiri dirumah dengan peralatan yang berasal dari bantuan stimulan mesin jahit dari UPTD PSRWTS.
 - 5 orang lainnya telah membuka usaha salon didaerahnya masing-masing dengan peralatan yang berasal dari bantuan stimulan UPTD PSRWTS.
- Terbinanya anak terlantar sebanyak 130 orang terdiri atas : 30 orang di panti anak amal bhakti sekayu MUBA, 30 org di panti anak budi mulya lubuk linggau MURA, 20 orang di Panti anak tunas harapan kayu agung OKI dan 50 orang anak remaja putus sekolah di Panti sosial bina remaja Indralaya di Indralaya Ogan Ilir.
- Anak- anak yang berada di 3 panti anak dengan usia mereka yang bervariasi mereka dapat mengenyam pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan menengah atas (SLTA)
 - Sedangkan anak remaja putus sekolah di Panti Sosial bina remaja Indralaya mereka diberikan bimbingan mental sosial dan bimbingan keterampilan menjahit, salon dan montir motor dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah peserta keterampilan montir motor sebanyak 16 orang, dari jumlah tersebut 10 orang membuka usaha sendiri dan 6 orang bekerja dibengkel.
 - Keterampilan menjahit berjumlah 18 orang, dari jumlah tersebut : 5 orang telah bekerja pada usaha konveksi dan 13 orang membuka usaha sendiri.

- Keterampilan Salon 16 orang dari jumlah tersebut 9 orang telah bekerja disalon-salon, sedangkan 6 orang membuka usaha sendiri, melanjutkan pendidikan sebanyak 1 orang.
- Pengasramaan dan penyediaan kebutuhan dasar (permakanan) penyediaan peralatan kebersihan/bahan pembersih, penyediaan tenaga pengasuh dan keamanan di 3 panti anak, penyediaan tenaga pengasuh dan keamanan di panti anak, penyediaan tenaga bimbingan spiritual, penyediaan tenaga narasumber/ tenaga instruktur.
- Pemberian bantuan gizi kepada 140 orang Penyandang Disabilitas Berat, yang tersebar di 7 kab/kota sebagai berikut :Dengan rincian bantuan sebagai berikut:
 - Bubur tim sebanyak 640 kotak
 - Biskuit/roti sebanyak 320 kaleng
 - Susu bubuk sebanyak 480 kotak
 - Beras @10 kg sebanyak 160 karung
 - Gula @2 kg sebanyak 320 kg
 - Terigu @2 kg sebanyak 320 kg
 - Minyak sayur @ 2 kg sebanyak 320 kg
- Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi 40 lanjut usia di 4 kab/kota. dengan rincian bantuan sebagai berikut:
 - Beras @ 20 kg sebanyak 40 karung
 - Biskuit sebanyak 80 kaleng
 - Susu sebanyak 80 kotak
 - Minyak Kayu Putih sebanyak 40 botol
 - Handuk sebanyak 40 buah
 - Kain panjang sebanyak 40 buah
 - Sprei sebanyak 40 buah
 - Selimut sebanyak 40 buah
 - Popok celana dewasa sebanyak 40 pack

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan dengan cukup baik dan dapat mencapai seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi yang diberikan.

Agar kinerja tersebut bisa lebih baik lagi, kedepanya perlu adanya peningkatan dalam beberapa hal. Baik itu berupa peningkatan kapasitas SDM sosial, anggaran bidang sosial maupun koordinasi antar instansi yang terkait, karena penyelesaian masalah sosial ini tidak bisa dan tidak akan seselai jika dikerjakan oleh Dinas Sosial sendiri.